

Peran Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Somahode Kecamatan Oba Utara

Sahril Ahmad¹

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nuku¹
syahrilahmad@gmail.com

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Implementasi
Pemberdayaan Perempuan
PKH (Program Keluarga
Harapan)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dalam pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, yang diwujudkan salah satunya melalui PKH sebagai inisiatif nasional sejak 2007. Program ini merupakan bantuan sosial nontunai bersyarat yang menargetkan keluarga sangat miskin, dengan fokus penting pada pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Somahode pada Agustus–September 2025. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasi Perlindungan Jaminan Sosial, Koordinator PKH Kecamatan, Koordinator Pendamping PKH Desa, serta empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan melalui kebijakan, koordinasi program, dan pemberdayaan perempuan. Faktor pendukungnya adalah dukungan kebijakan pemerintah dan pendamping PKH yang aktif, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan tenaga pendamping, kondisi geografis, dan validasi data KPM. Secara umum, peran Dinas Sosial cukup signifikan dalam meningkatkan kemandirian perempuan di Desa Somahode, namun masih belum optimal karena kendala struktural dan internal

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis Korespondensi:

Syahril Ahmad
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Nuku
Kelurahan Gamtufkange, Jl. Sultan Mansyur, Kota Tidore Kepulauan, Indonesia
Email: syahrilahmad@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, namun tingkat kesejahteraannya masih tertinggal dibanding negara maju. Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh rakyat. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, sejak 2007 pemerintah melalui Kementerian Sosial RI meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin untuk memperkuat perlindungan sosial.

Pemerintah menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender. Di Kota Tidore Kepulauan, PKH bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dan layanan sosial, termasuk perhatian bagi ibu hamil dan bayi.

Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan berperan penting dalam mengatur, mengawasi, dan mendampingi pelaksanaan PKH agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu mandiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH di Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH di Desa Somahode Kecamatan Oba Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH di Desa Somahode Kecamatan Oba Utara?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Agustus hingga September 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan secara langsung dan mendalam fenomena yang terjadi pada objek penelitian, yang data dan analisisnya cenderung bersifat deskriptif daripada kuantitatif.

Data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari instansi terkait, meliputi dokumen dan arsip resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

1. **Observasi** – Pengamatan langsung di lapangan untuk mencocokkan informasi dengan kondisi nyata.
2. **Wawancara** – Proses tanya jawab antara peneliti dan responden guna memperoleh informasi mendalam, baik sebagai studi pendahuluan maupun untuk memahami pandangan responden.
3. **Dokumentasi** – Pengumpulan informasi dari berbagai dokumen, arsip, dan data tertulis yang mendukung penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan mengikuti model Miles dan Huberman, melalui tiga tahapan utama:

1. **Reduksi Data** – Menyaring dan menyeleksi informasi penting, merangkum data, serta menemukan tema dan pola utama.
2. **Penyajian Data** – Menyusun hasil penelitian dalam bentuk yang terstruktur seperti tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami.
3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi** – Membuat kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi melalui pengumpulan bukti tambahan hingga data dianggap jenuh dan valid.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH di Desa Somahode diwujudkan melalui tiga aspek utama:

1. Peran dalam Aspek Kebijakan dan Regulasi

Dinas Sosial berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Tugasnya meliputi penetapan sasaran penerima manfaat sesuai kriteria serta pengawasan pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran. Kebijakan dan regulasi menjadi dasar penting untuk menjamin konsistensi pelaksanaan PKH. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan arahan teknis kepada koordinator dan pendamping, seperti pembaruan data serta pelaksanaan pertemuan rutin dengan KPM.

2. Peran dalam Aspek Koordinasi dan Implementasi Program

Dalam pelaksanaan PKH, Dinas Sosial berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat kecamatan maupun desa. Fungsi ini diwujudkan melalui

koordinasi rutin, pemantauan kegiatan kelompok, penyaluran bantuan, dan verifikasi data penerima. Pendamping PKH di tingkat desa berperan penting sebagai fasilitator dan pembimbing, tidak hanya mengawasi bantuan, tetapi juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu KPM mengenai pengelolaan dana untuk kebutuhan anak sekolah. Melalui koordinasi yang teratur, implementasi program mencakup penyaluran bantuan, peningkatan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Peran dalam Aspek Pemberdayaan Perempuan

Program PKH tidak sekadar memberikan bantuan tunai, tetapi juga berfungsi sebagai media peningkatan kesadaran, keterampilan, dan kemandirian perempuan. Pendamping PKH memegang peran utama dalam memberikan edukasi dan motivasi, mendorong ibu-ibu KPM untuk memanfaatkan bantuan demi pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan usaha produktif kecil. Melalui pertemuan kelompok, para ibu dibekali pengetahuan agar lebih percaya diri mengelola keuangan dan tidak bergantung pada pihak lain. Banyak KPM merasa lebih terarah dan berinisiatif mencari penghasilan tambahan. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dalam PKH menjadi proses berkelanjutan yang bertujuan mengubah pola pikir dan meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Dinas Sosial

1. Faktor Pendukung

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Program PKH memiliki dasar hukum yang kuat sebagai program nasional dan mendapat dukungan lintas sektor dari pemerintah daerah, seperti kerja sama dengan dinas kesehatan dan pendidikan.
2. Keberadaan Pendamping PKH yang Aktif
Pendamping berperan sebagai penghubung langsung antara Dinas Sosial dan KPM, menjalankan fungsi pendampingan melalui pertemuan rutin untuk membahas aspek kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan keluarga.
3. Respons Positif dari Masyarakat atau KPM
Sebagian besar penerima manfaat menunjukkan sikap syukur dan penerimaan positif terhadap bantuan PKH. Mereka mulai memahami bahwa program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi dan sosial, bukan hanya sekadar pemberian uang tunai.

2. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah pendamping PKH di wilayah Oba Utara masih terbatas dibandingkan banyaknya KPM, sehingga pendampingan intensif belum bisa dilakukan secara merata.
2. Kendala Geografis
Kondisi geografis seperti akses jalan yang sulit, kerusakan infrastruktur, dan lemahnya jaringan komunikasi, terutama saat musim hujan, sering menghambat proses koordinasi, pendampingan, dan penyebaran informasi kepada KPM.
3. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran KPM yang Rendah
Sebagian penerima manfaat masih belum memahami esensi PKH sebagai upaya pemberdayaan. Mereka cenderung melihatnya sebagai bantuan uang semata dan kurang berpartisipasi dalam pertemuan kelompok maupun kegiatan peningkatan kapasitas.
4. Permasalahan Data (Validasi dan Pembaruan KPM)
Proses validasi dan pembaruan data seperti status anak yang telah lulus sekolah atau KPM yang sudah mampu sering memerlukan waktu dan koordinasi panjang. Ketidakkuratan data dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menghambat penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

3.3. Interpretasi Data

Hasil penelitian dianalisis menggunakan empat faktor penentu implementasi kebijakan menurut George Edward (dalam Winarno, 2016), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi: Proses komunikasi dalam pelaksanaan PKH berjalan cukup efektif melalui pertemuan rutin bulanan yang dilakukan secara tatap muka. Informasi disampaikan dengan jelas, konsisten, dan mudah dipahami, sesuai dengan pandangan Edward mengenai pentingnya komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan.
2. Sumber Daya: Walaupun terdapat keterbatasan jumlah pendamping, dedikasi mereka yang tinggi membantu menjaga keberlangsungan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi, sebagaimana ditekankan oleh Edward.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana): Dinas Sosial menunjukkan komitmen dan sikap positif dalam menjalankan koordinasi dan memberikan arahan kepada para pendamping. Hal ini sejalan dengan teori Edward yang menyatakan bahwa sikap dan kemauan pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi: Struktur pelaksanaan PKH sudah tersusun dengan baik, namun masih terdapat hambatan administratif, khususnya dalam proses validasi dan pembaruan data KPM, yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan.

Secara umum, Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan melalui PKH di Desa Somahode. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi geografis wilayah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai Peran Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

Dinas Sosial berperan sebagai pelaksana, penerjemah, dan pengawas kebijakan PKH dari tingkat pusat ke daerah. Lembaga ini memastikan ketepatan sasaran program serta memberikan arahan teknis bagi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dinas Sosial menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan secara sistematis bersama koordinator wilayah dan pendamping PKH. Melalui kerja sama ini, penyaluran bantuan dan kegiatan pemberdayaan, seperti pertemuan kelompok, dapat berlangsung sesuai prosedur dan tujuan program.

Program PKH di Desa Somahode berperan penting dalam meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian perempuan penerima manfaat. Fokus utama pemberdayaan diarahkan pada peningkatan pengetahuan tentang pendidikan dan kesehatan keluarga, serta dorongan bagi perempuan untuk mengembangkan usaha produktif kecil sebagai wujud kemandirian ekonomi. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memberikan legitimasi kuat terhadap pelaksanaan PKH. Peran aktif pendamping PKH sebagai ujung tombak program di lapangan yang menjembatani Dinas Sosial dengan penerima manfaat. Respon positif dan partisipasi masyarakat, khususnya dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang menunjukkan dukungan terhadap tujuan program.

Keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah pendamping yang belum memadai. Kondisi geografis wilayah Oba Utara yang menyulitkan akses transportasi dan memperlambat distribusi informasi. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran sebagian penerima manfaat, sehingga masih ada yang belum memahami tujuan PKH secara utuh. Masalah validasi dan pembaruan data KPM, yang memerlukan koordinasi intensif dan dapat memengaruhi ketepatan sasaran program. Secara keseluruhan,

Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan telah menunjukkan peran penting dalam pelaksanaan PKH di Desa Somahode, terutama dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala struktural dan internal, khususnya pada aspek sumber daya manusia dan sistem birokrasi data, sebagaimana ditegaskan dalam teori George Edward.

REFERENSI

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Esterberg, K. G. 2002. *Qualitative methods in social research* (Nomor 300.18 E8).
- Harbani Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Hawadi, L. F., Siregar, S. V., Setyowati, S., Elya, B., Harkrisnowo, H., dan lainnya. (2023). *Antologi Kesetaraan Gender*. Eureka Media Aksara.
- Jogiyanto. 2002. *Analisis dan Desain Sistem*. Andy Offset. Yogyakarta.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin.
- Kurniawan, Benny. 2012. *Metodologi Penelitian*. Tangerang Selatan: Hak Cipta.
- Mawardi. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto*. Banda Aceh: Al-Mumtaz Institut dan Instructional Development (IDC).
- Mariana, Surya. 2021. *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2019)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Narayan, D. 2000. *Social Capital Implications for Development Theory, Research and Policy*. The World Bank Research Observe.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Harima Issha dan Nibras Nada Nailufar. 2022. Upaya Pemerintah Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan. *kompas.com*. Diakses Pada 28/08/2024
- Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Poerwadarminta, S. 2003. *Manajemen Sosial: Teori dan Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prijono, O.S., dan Pranarka, A.M.W . 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Putra, Sampoerna Foundation. 2024. *Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia*. www.sampoernafoundation.org/id/meningkatkan-pemberdayaan-perempuan-di-indonesia. Diakses pada 28/08/2024
- Soerjono, Soekanto**. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat: Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- _____. 2004. *Otonomi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Impac.
- Sudjana. 2001. *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sunyoto, Usman. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taneko, Soleman B. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial Dan System Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.
- Tjokromidjojo. 1995. *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tjandra, W. Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Winarno,Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori,Proses dan Studi Kasus Kompratif)*, Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service).
- Zakiyah. 2010. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No.XVII.